

HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM AGRIBISNIS

Oleh : Dr. Ir. Sjafrli Mangkuprawira

Dosen Fakultas Pertanian dan Pascasarjana (Program MMA) IPB

Agribisnis adalah suatu kesatuan sistem usaha yang antar subsistemnya (penyediaan faktor-faktor produksi, budidaya/produksi, pengolahan/ agroidustri, dan distribusi pemasaran) saling terkait. Keterkaitan tersebut dijalin oleh kelembagaan. Menurut Pakpahan (1994), satuan keterkaitannya adalah transaksi dimana kelembagaan (*property rights*, batas yuridiksi dan aturan representasi) mengkondisikan transaksi tersebut. Dengan demikian, transaksi akan ditentukan secara bermakna oleh kelembagaan, baik itu sebagai suatu aturan, norma, tradisi, hukum maupun sebagai organisasi.

Sebagai suatu sistem, di dalam organisasi terdapat elemen-elemen tujuan dan sasaran, struktur, teknologi, manajemen dan pelaku, serta elemen lingkungan. Elemen-elemen tersebut memiliki interdependensi fungsional dalam menghasilkan output tertentu. Tergantung pada bentuk dan ragamnya, secara konseptual akan terdapat klasifikasi bekerjanya suatu sistem dengan kriteria khas yaitu : Pertama, tingkat *kemungkinan* untuk diramalkan yang didasarkan atas dua patokan yang bersifat *determinitis* dan yang bersifat *probabilitis*; dan kedua, tingkat atau derajat *kompleksitas*

(sederhana, kompleks, sangat kompleks).

Misalnya, suatu perusahaan yang skala usahanya semakin besar merupakan kesatuan sistem probabilitas yang relatif kompleks. Keputusan-keputusan yang dibuat mempengaruhi sejumlah subsistem dalam sistem yang bersangkutan, dan hingga derajat tertentu keputusan tersebut mengubah operasi

Dalam situasi tertentu dimana investasi perusahaan besar dalam bidang pertanian tidak bermitra dengan ekonomi rakyat maka sering menimbulkan penurunan ruang gerak ekonomi rakyat. Jika dibiarkan akan terjadi polarisasi aset produksi dan penguasaan kegiatan ekonomi mulai dari tingkat hulu sampai hilir hanya pada perusahaan - perusahaan besar, yang pada gilirannya dapat mengganggu perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah tidak segan-segannya menghimbau perusahaan-perusahaan besar untuk mengikutsertakan usaha ekonomi rakyat dalam mitra usaha. Namun demikian apakah implementasinya semudah dengan himbauan itu sendiri ?

perusahaan untuk mencapai tingkat laba tertentu; yang semuanya itu bersifat probabilitas. Dewasa ini, organisasi-organisasi (bisnis dan non bisnis) berkembang sampai tingkat skala usaha "besar", sehingga banyak yang termasuk dalam kategori sistem probabilitas yang luar biasa kompleksnya.

Kembali kepada pengertian agribisnis sebagai suatu

sistem, maka sudah dapat diduga, hubungan antar subsistem akan demikian kompleksnya yang sangat ditentukan pula oleh bekerjanya antar subsistem yang ada. Lihat saja, misalnya pada lembaga usaha ekonomi pertanian rakyat (tradisi) *versus* lembaga usaha ekonomi pertanian besar (modern). Lembaga usaha ekonomi pertanian tradisi dicirikan oleh perilaku usaha tradisional, subsisten, penguasaan IPTEK rendah, produktivitas rendah dan pasar terbatas. Sedangkan lembaga usaha ekonomi pertanian modern memiliki dan menguasai aset lahan dan modal "besar", penguasaan IPTEK yang tinggi dan berorientasi ekspor. Dalam situasi tertentu dimana investasi perusahaan besar dalam bidang pertanian tidak bermitra dengan ekonomi rakyat maka sering menimbulkan penurunan ruang gerak ekonomi rakyat. Jika dibiarkan akan terjadi polarisasi aset produksi dan penguasaan kegiatan ekonomi mulai dari tingkat hulu sampai hilir hanya pada perusahaan - perusahaan besar, yang pada gilirannya dapat mengganggu perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah tidak segan-segannya menghimbau perusahaan-perusahaan besar untuk mengikutsertakan usaha ekonomi rakyat dalam mitra

kan oleh perilaku usaha tradisional, subsisten, penguasaan IPTEK rendah, produktivitas rendah dan pasar terbatas. Sedangkan lembaga usaha ekonomi pertanian modern memiliki dan menguasai aset lahan dan modal "besar", penguasaan IPTEK yang tinggi dan berorientasi ekspor. Dalam situasi tertentu dimana investasi perusahaan besar dalam bidang pertanian tidak bermitra dengan ekonomi rakyat maka sering menimbulkan penurunan ruang gerak ekonomi rakyat. Jika dibiarkan akan terjadi polarisasi aset produksi dan penguasaan kegiatan ekonomi mulai dari tingkat hulu sampai hilir hanya pada perusahaan - perusahaan besar, yang pada gilirannya dapat mengganggu perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah tidak segan-segannya menghimbau perusahaan-perusahaan besar untuk mengikutsertakan usaha ekonomi rakyat dalam mitra

usaha. Namun demikian apakah implementasinya semudah dengan himbauan itu sendiri ?

Idealnya hubungan kelembagaan agribisnis adalah hubungan yang bersifat *struktural fungsional*, dan *kultural* melalui program kemitraan dan kesejajaran. Dengan hubungan kemitraan, diharapkan dapat terjalin hubungan antara usaha-usaha besar, menengah, dan kecil (*struktural*) berdasarkan prinsip-prinsip saling butuh, saling penting, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (*kultural*). Terwujudnya hubungan kemitraan tersebut diharapkan akan menciptakan efektifitas, efisiensi, produktivitas dan nilai tambah (*fungsional*) bagi berbagai pihak dalam agribisnis.

Terjadinya hubungan program kemitraan antar subsistem dalam agribisnis termasuk lembaga-lembaga pelayanan sosial ekonomi yang efektif dan efisien akan dicirikan oleh kualitas transaksi itu sendiri. Untuk itu, ada beberapa pertanyaan

pokok yang perlu dijawab seperti :

Pertama, bagaimana ciri-ciri pelaku agribisnis dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan memanfaatkan serta menciptakan kesempatan ekonomi yang ada ?

Kedua, kepada pelaku yang mana titik berat inisiatif diarahkan ? Apakah berdampak memperkuat inisiatif, kreatif, partisipatif, dan proaktif atau sebaliknya ?

Ketiga, dimasa datang, iklim persaingan usaha dengan pen-

garuh pasar internasional (globalisasi, APEC, dan GATT) akan semakin positif/sangat signifikan; pertanyaannya apakah pelaku agribisnis sudah siap untuk melakukan orientasi? apa saja pra kondisi yang dibutuhkan? dan bagaimana kelembagaan mampu mengkondisikan bentuk, pola, irama, dan jenis interaksi/ interdependensi sehingga setiap pelaku agribisnis mampu mengembangkan kesempatan ekonomi, memiliki derajat kepastian interaksi yang tinggi, dan memiliki derajat kemampuan rebut tawar yang propor-

Idealnya hubungan kelembagaan agribisnis adalah hubungan yang bersifat *struktural fungsional*, dan *kultural* melalui program kemitraan dan kesejajaran. Dengan hubungan kemitraan, diharapkan dapat terjalin hubungan antara usaha-usaha besar, menengah, dan kecil (*struktural*) berdasarkan prinsip-prinsip saling butuh, saling penting, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (*kultural*). Terwujudnya hubungan kemitraan tersebut diharapkan akan menciptakan efektifitas, efisiensi, produktivitas dan nilai tambah (*fungsional*) bagi berbagai pihak dalam agribisnis.

sional ?.

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat relevan untuk dijawab mengingat berbagai faktor strategis berikut ini :

□ Dalam GBHN 1993, tertulis bahwa salah satu upaya mewujudkan perekonomian yang mandiri dan andal adalah melalui pembangunan pertanian yang tangguh. Arah pembangunan pertanian tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi tetapi juga pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

petani melalui kegiatan usaha berwawasan agribisnis. Pada gilirannya petani seharusnya mampu memiliki kekuatan rebut tawar yang tangguh dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

□ Iklim kondusif dari pemerintah untuk memberikan peluang-ruang gerak kepada semua lembaga/pelaku agribisnis secara merata masih memiliki posisi peran yang sangat strategis baik dalam aspek permodalan, ekonomi perdagangan, struktur pasar, pengembangan teknologi, penelitian, penyuluhan, maupun dalam pengembangan sumberdaya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan/ peluang pasar internasional. Kita tidak ingin munculnya berbagai fenomena jatuh bangunnya lembaga-lembaga ekonomi, terutama yang kecil dan menengah, hanya sebagai akibat ketidaktepatan

kebijakan nasional ketimbang masalah manajemen kelembagaan itu sendiri.

□ Derajat kualitas para pelaku agribisnis cenderung beragam-baik dalam kemampuan modal, sumberdaya manusia, managerial, penguasaan teknologi, akses dan perluasan pangsa pasar. Keragaman ini tidak saja didasarkan pada jenis komoditi atau sektor yang diusahakan tetapi juga pada keragaman pola usaha, skala usaha, dan akses ekonomi wilayah.

- Hubungan kelembagaan agribisnis yang lancar dicirikan oleh makin meningkatnya daya inovasi kelembagaan dan individu pelaku dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi, serta membuat keputusan dan menciptakan sikap kemandirian.
- Syarat pokok terjadinya hubungan kelembagaan yang tangguh adalah terwujudnya konsolidasi di kalangan pelaku atau institusi itu sendiri. Sewajarnya, tiap lembaga atau individu memiliki spirit/motivasi membangun dirinya dalam jiwa bisnis yaitu jiwa usaha yang selalu berorientasi pada efisiensi, mutu dan mampu menghadapi resiko usaha. Namun demikian, dari pengamatan empiris masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ekonomi nasional seperti : (a) motivasi, sikap hidup, pola tingkah laku, adat istiadat dan sebagainya; (b) kemampuan teknis pengolahan usaha; (c) potensi dan kesempatan usaha; (d) hambatan struktur

pasar; (e) sarana dan prasarana kelembagaan; (f) iklim perekonomian, termasuk kebijakan pemerintah; dan

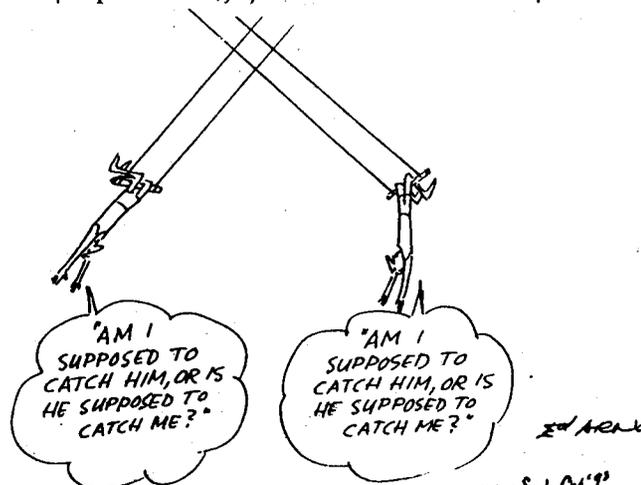
seharusnya mampu mendorong berbagai pihak untuk diadakannya kajian-kajian strategis yang menyangkut perilaku hubungan kelembagaan ditinjau dari berbagai segi.

Pertemuan-pertemuan ilmiah dan bisnis antar pengusaha agribisnis yang bergerak baik didalam subsistem maupun antar subsistem sewajarnya harus mulai ditingkatkan. Sasaran strategisnya bukan saja yang berorientasi ekonomi tetapi juga kelembagaan yaitu bagaimana semua pelaku terdorong untuk menumbuhkan, mendewasakan, dan mengembangkan sistem agribisnis yang kokoh

(g) sistem pengembangan IPTEK.

Melihat berbagai permasalahan di atas maka dapat ditunjukkan bahwa pertanian yang berwawasan agribisnis di Indonesia belum "melembaga" secara optimal. Dengan kata lain karena dimensi hubungan kelembagaan agribisnis bukanlah merupakan fenomena yang sederhana. Dalam situasi yang sangat cepat berubah ini diperlukan suatu pemahaman kritis, tidak saja dari sisi konseptual tapi juga dari sisi operasional yang berorientasi pada masa depan. Yang jelas, hal demikian

Pertemuan-pertemuan ilmiah dan bisnis antar pengusaha agribisnis yang bergerak baik didalam subsistem maupun antar subsistem sewajarnya harus mulai ditingkatkan. Sasaran strategisnya bukan saja yang berorientasi ekonomi tetapi juga kelembagaan yaitu bagaimana semua pelaku terdorong untuk menumbuhkan, mendewasakan, dan mengembangkan sistem agribisnis yang kokoh. Prakarsa-prakarsa aktif dari Badan Agribisnis Departemen Pertanian untuk hal diatas sangatlah diharapkan. Terbentuknya Perhimpunan Manajemen Agribisnis Indonesia bulan Desember 1994 yang lalu juga seharusnya mampu berperan sebagai ajang berkiprah masyarakat agribisnis dalam mengembangkan jalinan keterkaitan fungsional antar subsistem secara proposional. (AW/AIS)



Sumber: HBR: Sept. Oct '93

SERIOUS COMMUNICATION PROBLEMS #02/39